

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 29,381,552, dibandingkan dengan pada 31 Desember 2023 Rp 114.714.794. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 16,855,839,146, atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 17,138,336,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 15,376,952,688 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 730,517,104 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 14,646,435,584 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 385,000. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 3,535,082 dan Rp 15,373,417,606.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp (12,009,352), sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp (20,508,527,149), sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 20,496,517,797 dibandingkan pada periode 31 Desember 2023 Rp 23,040,359,262 Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya pada periode 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 10,393,008 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp20,486,124,789 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023 Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp23,040,359,262.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp 19,039,118,302 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(20,486,124,789) dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 4,609,001 dan dikurangi dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 16,825,033,094 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 15,373,417,606, dibandingkan pada Tahun Anggaran 2023 Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 22,097,073,044 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(13,283,108,052) dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan dikurangi dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 19,982,404,520 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 19,039,118,302.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan

lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024		% thd Angg	31 Desember 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	29.381.552	100,00	114.714.794
JUMLAH PENDAPATAN		-	29.381.552	100,00	114.714.794
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	4.037.712.000	4.034.240.411	99,91	3.572.301.249
Belanja Barang	B.4	12.217.300.000	11.938.997.425	97,72	14.441.099.968
Belanja Modal	B.5	883.324.000	882.601.310	99,92	2.082.413.097
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		17.138.336.000	16.855.839.146	98,35	20.095.814.314

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
T			
T LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	1.622.200
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	(8.111)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	730.517.104	550.725.642
Jumlah Aset Lancar		730.517.104	552.339.731
TANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
T TETAP			
Tanah	C.14	2.228.156.034	2.228.156.034
Peralatan dan Mesin	C.15	39.866.263.237	40.055.217.176
Gedung dan Bangunan	C.16	10.071.443.993	9.428.726.193
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	995.251.376	995.251.376
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(38.514.679.056)	(34.218.796.651)
Jumlah Aset Tetap		14.646.435.584	18.488.554.128
T LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	385.000	71.649.067
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(385.000)	(71.649.067)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		15.376.952.688	19.040.893.859
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	3.535.082	1.775.557
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	50.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.585.082	1.775.557
JUMLAH KEWAJIBAN		3.585.082	1.775.557
LIABILITAS			
Ekuitas	C.28	15.373.417.606	19.039.118.302
JUMLAH EKUITAS		15.373.417.606	19.039.118.302
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.377.002.688	19.040.893.859

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 31
Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	114.714.794
JUMLAH PENDAPATAN		-	114.714.794
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4.034.240.411	3.570.679.049
Beban Persediaan	D.3	170.326.630	215.516.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	7.114.637.316	11.219.248.920
Beban Pemeliharaan	D.5	2.394.654.045	1.341.238.310
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.081.347.497	1.692.716.607
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	4.713.321.250	5.115.667.059
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		20.508.527.149	23.155.065.945
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(20.508.527.149)	(23.040.351.151)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		10.393.008	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		15.570.000	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		5.356.992	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		10.393.008	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		20.486.124.789	23.040.359.262
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		20.486.124.789	23.040.359.262

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 31
Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	19.039.118.302	22.097.073.044
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(12.568.738.983)	(13.282.357.673)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	(4.609.001)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(4.617.112)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	8.111	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	16.825.033.094	19.982.404.520
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(3.665.700.696)	(3.057.954.742)
EKUITAS AKHIR	E.5	15.373.417.606	19.039.118.302

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna

<i>Dasar Hukum</i>	Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: per.33/pERMEN-Kp/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, antara lain: 1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan sumber dayakelautan dan perikanan; 2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 3. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); 4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan; 5. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan;
<i>Entitas dan Rencana Strategis</i>	

7. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;

8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna berkomitmen dengan visi “**pelaksanaan pemamfaatan sumber daya kelautan dan perikananyang terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan di lingkup Stasiun PSDKP Tahuna**” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja.
- Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja.
- Meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah kerja.
- Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggungjawab dan berkelanjutan di wilayah Stasiun PSDKP Tahuna.

Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Lembaga, Memberantas IUU Fishing untuk meningkatkan kedaulatamn Ekonomi, Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian dan keberlanjutan usaha masyarakat kelautan dan perikanan.

Stasiun PSDKP Tahuna memiliki Sumebrdaya Manusia

bidang kelautan dan perikanan yang berstatus PNS sebanyak 22 Orang dan Tenaga kontrak sebanyak 12 Orang.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun PSDKP Tahun. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Pengawasan SDKP Tahunana menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Tahunan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah

sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Rapat pembahasan permasalahan SIMAK Barang

Milik Negara (BMN) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait permasalahan pencatatan dan pelaporan BMN Tahun 2017 dan 2018

1. Kebijakan akuntansi dan pencatatan persediaan

a. Persediaan Biota Ikan

- KSAP belum mengatur standar akuntansi terkait aset biologis sebagai persediaan;
- Perlu ada standar akuntansi untuk mencatat aset biologis, dhi. di lingkungan KKP berupa Persediaan biota ikan;
- KKP telah menerbitkan:
 - 1) Perdirjen Perikanan Budidaya Perdirjen PB No.300/PER-DJPB/2019 tanggal 28 September 2019 tentang pedoman umum penatausahaan barang persediaan kegiatan perekayasaan dan produksi di unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
 - 2) SE Sekjen No.B.1550/SJ/PL.930/XII/2019 pada tanggal 28 Desember 2019 tentang penatausahaan barang milik negara berupa persediaan;
- KKP perlu melakukan evaluasi kembali atas SE Sekjen dan Perdirjen Perikanan Budidaya terkait pencatatan persediaan khususnya persediaan biota ikan yang disesuaikan dengan karakteristik nilai dan kuantitas persediaan (PNBP atau metode lainnya).

b. Persediaan Suku Cadang Kapal

- Suku cadang kapal sesuai karakteristiknya tetap

dicatat sebagai persediaan;

- KKP perlu membuat kartu kendali persediaan suku cadang serta melakukan stok opname fisik pada akhir periode baik yang ada di gudang maupun yang ada di kapal.

c. Persediaan BBM Kapal

- Pencatatan persediaan BBM Kapal dikeluarkan dari Neraca namun perlu diungkap dalam CaLK KKP;
- BBM yang berada di kapal diperlakukan sebagai beban persediaan pada saat BBM diisi ke tangki kapal;
- Mengutip pernyataan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tingkat akurasi hasil stok opname fisik BBM di kapal tergantung pada posisi dan kondisi kapal;
- Cost untuk menghitung persediaan BBM Kapal lebih besar dibandingkan benefit dari pencatatan BBM Kapal, karena secara substansi KKP tidak memiliki gudang penyimpanan BBM kapal;
- KKP perlu membuat aturan terkait mekanisme pengendalian penggunaan BBM oleh Kapal, untuk mencegah penyalahgunaan BBM Kapal sebagai laporan manajerial;
- Di Tahun 2020 diperlukan review ulang atas penganggaran belanja BBM yang selama ini sebagai belanja persediaan

2. Pencatatan Aset Tetap & Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

a. Aset Tetap

- Aset Tetap Tanah yang bersaldo tidak normal, merupakan aset urugan untuk pematangan tanah senilai Rp1,88 miliar sebanyak 3 NUP di atas tanah milik Pemprov Sumatera Utara, Jambi, dan Sulawesi Tengah
 - Aset tanah di atas tanah pemda, dilakukan koreksi menjadi ATR pada Satker Konsolidasi di tahun 2019 dan akan dilakukan koreksi di tingkat satker di tahun 2020. Selanjutnya KKP akan melakukan proses hibah ATR tersebut ke pemda terkait.
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp156 jt secara substansi merupakan persediaan habis pakai dan nilai buku sudah nihil. KKP di tahun 2020 akan melakukan penghapusan aset tersebut.
- Transaksi penyusutan tidak wajar senilai Rp50,98 miliar:
 - KKP akan mengungkapkan adanya penyusutan tidak wajar pada laporan keuangan Tahun 2019.
 - KKP akan melakukan koordinasi dengan Kemenkeu untuk menyelesaikan penyusutan tidak wajar pada Aplikasi SIMAK di Tahun 2020

b. KDP

- Saldo KDP perolehan 2008-2017 sebanyak 281 NUP bernilai negatif senilai Rp78,87 Miliar
 - Aset KDP bernilai negatif tidak mempengaruhi nilai saldo KDP di Neraca KKP per 31 Desember 2018, karena KDP yang dimaksud bernilai negatif per NUP juga memiliki nilai positif di NUP yang berbeda atas KDP yang sama.
 - KDP bernilai negatif terjadi karena satker saat melakukan penginputan KDP menjadi aset defenitif menggunakan NUP yang berbeda dengan NUP KDP awal.
 - NUP Aset KDP yg telah ditemukan aset defenitifnya sebanyak 105 NUP senilai Rp40,10 miliar.
- KDP memiliki transaksi mutasi yang tidak wajar senilai Rp0,79 Milyar antara lain penambahan/pengembangan/transfer masuk dinilai minus, transfer keluar dinilai positif yang merupakan bagian dari KDP sebanyak 281 NUP bernilai negatif sebesar Rp78,87 Miliar
- Mutasi keluar dari KDP senilai Rp3,18 Milyar tidak menambah aset tetap
 - Sebesar Rp1,9 Miliar sedang dilakukan inventarisasi.
 - Sebesar Rp1,2 Miliar telah ditemukan asetnya dan akan dicatat sebagai penambahan saldo awal pada Tahun 2020

3. ATB

- Saldo Hasil Kajian/Penelitian (Rekomendasi Teknologi) senilai Rp11,09 miliar akan dilakukan koreksi pada laporan keuangan Tahun 2019 karena secara substansi bukan merupakan ATB.
- Saldo Paten senilai Rp12,70 Miliar belum memasukkan:
 - 4 Paten belum jelas status sertifikatnya
 - 6 Paten sudah memiliki sertifikat

KKP akan melakukan inventarisasi biaya perolehan.
- Amortisasi :
 - Amortisasi 26 paten senilai Rp1,04 Miliar belum didukung bukti pendaftaran.
 - Tanggal penerimaan 10 paten senilai Rp0,41 Miliar berbeda dengan tanggal perolehan untuk perhitungan amortisasinya.

KKP akan melakukan inventarisasi bukti pendaftaran dan tanggal perolehan ATB.
- ATB pada Direktorat Pakan dan Obat Ikan tidak ditemukan senilai Rp221,48 juta
 - KKP telah mengidentifikasi jenis ATB tersebut. Selanjutnya akan dilakukan inventarisasi dokumen perolehan ATB. Apabila ATB tersebut sudah tidak digunakan akan dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

*Aset Tetap***b. Aset Tetap**

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh

sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70
------------------------------	----

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- ✚ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- ✚ Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- ✚ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat

pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna telah mengadakan 4 (Empat) kali revisi; pertama adalah Revisi Halama DJA, Alasan/pertimbangan dilakukannya revisi anggaran terkait dengan kekurangan dokumen RKBMN pembangunan tempat penampungan sementara pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan. Tujuan revisi anggaran ini adalah untuk mengakomodir kegiatan sarana pembangunan tempat penampungan sementara pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan. Kedua, Revisi DJA karena refocusing Anggaran, Alasan/pertimbangan dilakukannya revisi anggaran sebagai akibat dari refocusing dan realokasi anggaran berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-3/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Refocusing dan Realokasi belanja K/L Tahun Anggaran 2021. Tujuan revisi anggaran ini adalah penyesuaian pagu belanja satker sebagai akibat dari perubahan postur anggaran. Ketiga, Revisi DJA, Alasan/pertimbangan dilakukannya revisi anggaran bahwa Direktorat Jenderal PSDKP mengusulkan pemanfaatan anggaran KRO 2350.RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan satker Sekretaris Ditjen PSDKP dalam rangka Pembangunan Kapal Pengawas Kelas B. Tujuan revisi anggaran ini adalah untuk optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran KRO 2350.RAL. Keempat, Revisi DJA Alasan/pertimbangan dilakukannya revisi anggaran adalah untuk penghematan alokasi belanja pegawai. Tujuan revisi anggaran ini adalah untuk refocusing dan realokasi belanja pegawai Stasiun PSDKP Tahuna sebesar

Rp. 351.000.000

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	4.417.712.000	4.037.712.000
Belanja Barang	12.002.392.000	12.217.300.000
Belanja Modal	969.654.000	883.324.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	17.389.758.000	17.138.336.000

Realisasi

*Pendapatan Rp
29,381,552*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 29,381,552. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024	
	Anggaran	Realisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	29.381.552
Penerimaan Hibah	-	-
Jumlah	-	29.381.552

PNBP lainya tahun 2024 berasal dari hasil penjualan lelang perlatan dan mesin speedboat Napoleon 017 tanggal 6 Juni 2024 NTPN; 5215E2G4VPKP9SIR, NTB; 626998307639 Rp.15,750,000, sesuai risalah lelang nomor 188/16.01/2024-01 tanggal 3 Mei 2024 dan surat Pelaksanaan lelang nomor; S-1556/KNL.1601/2024 tanggal 7 Mei 2024 dari Direktorat Jenderal kekayaan Negara Kanwil Sulut dan Pengembalian Kelebihan Bayar Tunjangan Kinerja pegawai tugas belajar NTPN; 29B0548VVEPI5KNN, NTB; 000000573432 tanggal 7 Juni 2024 Rp.1.622.200. Denda Keterlambatan Penyelesaian hasil pekerjaan berupa pembangunan Pgar dan Pos Jaga

Kantor PSDKP Tahuna senilai Rp. 12,009,352 Yang telah dilakukan pemotongan melalui SPM No. 00640T/170445/2024 SP2D No. 240831302002698 tanggal 5 Desember 2024. Denda keterlambatan selama 24 hari sehingga dapat perhitungan nilai denda dari SPK yaitu $1/1000$ setiap hari keterlambatan dari nilai kontrak sebelum PPN. $0,0001 \times 493,717,800 \times 24 = \text{Rp. } 12,009,353$.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara	29.381.552	114.714.794	390,43
Penerimaan Hibah	-	-	0,00
Jumlah	29.381.552	114.714.794	0,00

Dari tabel perbandingan diatas terlihat adanya penurunan pendapatan pada tahun 2024, Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan penerapan sanksi Administrasi yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Tahuna atas hasil tindak Pengawasan SDKP.

Realisasi Belanja

Negara Rp

16,855,839,146

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 16,855,839,146 atau 98% dari anggaran belanja sebesar Rp 17,138,336,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4.037.712.000	4.034.240.411	39,82
Belanja Barang	12.217.300.000	11.938.997.425	97,72
Belanja Modal	883.342.000	882.601.310	99,92
Belanja Bantuan Sosial		-	-
Total Belanja Kotor	17.138.354.000	16.855.839.146	98,35
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	17.138.354.000	16.855.839.146	98,35

Realisasi anggaran tahun 2024 menurut jenis belanja, seperti pada tabel diatas, memperlihatkan bahwa sampai dengan bulan Desember 2024, penyerapan anggaran belum menunjukkan nilai sesuai dari target di TA 2024 yaitu 98%. Nilai belanja yang paling sedikit terdapat pada jenis Belanja Modal, hal ini di karenakan kurangnya pembangunan konstruksi serta efisiensi anggaran TA 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Periode 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	'31 Desember 2024	'31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4.034.240.411	3.572.301.249	-
Belanja Barang	11.938.997.425	14.441.099.968	-
Belanja Modal	882.601.310	2.082.413.097	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	16.855.839.146	20.095.814.314	-

Jika dilihat pada tabel perbandingan jenis belanja tahun 2024 dan 2023 diatas, terjadi penurunan dikarenakan efisiensi anggaran.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2024, pada Stasiun PSDKP Tahuna terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dan V dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional yang pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 6 kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun PSDKP Tahuna dengan pagu mencapai Rp8.128.413.000 dan realisasi sebesar Rp2.965.377.100 dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)			
			Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	TPCRO (%)	PCRO (%)
2350	CBQ001	Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun	850.817.000	772.895.394	90,84	1	Unit	1	100
2350	QHD001	Operasi Kapal Pengawas	4.966.203.000	4.976.220.222	100,2	43	Operasi	43	100
2350	QHD003	Operasi Speedboat Pengawas	494.160.000	489.468.000	99,05	30	Operasi	30	100
2350	RCG001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	2.163.050.000	2.087.744.475	96,52	3	Unit	3	100
2352	QJC001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	150.000.000	139.679.207	93,12	2	Lembaga	2	100
2352	QJC002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	83.000.000	60.430.276	72,81	25	Lembaga	25	100
2353	QJC004	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	272.000.000	271.552.143	99,84	15	Lembaga	15	100

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp

4,034,240,411

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4,034,240,411 dan Rp. 3,572,301,249. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pada TA. 2024 terjadi kenaikan Belanja Pegawai dikarenakan adanya penerimaan PPPK..

Rincian Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1.815.622.605	982.356.055	54,11
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	193.228.678		0,00
Beban Lembur PNS	48.910.000	-	
Beban Lembur PPPK	5.835.000		
Beban Tunjangan Khusus Kinerja	1.787.260.457	757.605.221	42,39
Beban Tunjangan Khusus Kinerja PPPK	183.383.671		0,00
Sub Total	-	-	
Pengembalian Belanja	1.541.784	36	0,00
Jumlah	4.034.240.411	1.739.961.312	43,13

Pengembalian belanja pegawai terdiri atas Temuan BPK terkait kelebihan bayar tunjangan Kinerja dan tunjangan umum pegawai tugas belajar tahun 2023, NTPN; 88ABF2CPQAQR2L46 NTB; 000000491735 Rp.811.100; NTPN; 90DBF7NAPA95GL2V NTB; 000000676408 Rp.360.000; NTPN; 0F84D397A5D7FL2N NTB; 000000527308 Rp.370.000, Pembulatan Gaji PNS melalui mekanisme gaji di SPM.

Belanja Barang
Rp
11,938,997,425

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 11,938,997,425 dan Rp. 14,441,099,968. Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024 mengalami

penurunan karena terjadi perubahan pagu anggaran Belanja Barang dalam DIPA Stasiun PSDKP Tahuna.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.296.551.204	1.253.470.906	1,03
Belanja Barang Non Operasional	5.283.296.735	9.495.872.217	0,56
Belanja Barang Persediaan	181.269.980	194.090.250	0,93
Belanja Jasa	5.330.299.852	469.290.997	11,36
Belanja Pemeliharaan	2.563.502.157	1.335.658.991	1,92
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.070.120.980	1.692.716.607	1,22
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			-
Jumlah Belanja Kotor	16.725.040.908	14.441.099.968	1,16
Pengembalian Belanja	13.725.000	-	-
Jumlah Belanja	16.738.765.908	14.441.099.968	1,16

- Belanja barang Operasional sebesar Rp. 1,296,551,204,- meliputi kegiatan pembayaran Belanja penambah Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh, belanja pengiriman surat dinas Pos pusat, belanja keperluan perkantoran, belanja honor operasional satuan kerja.
- Belanja barang non operasional sebesar Rp. 5,283,296,735,- meliputi kegiatan pembayaran Belanja barang non operasional lainnya, belanja bahan, Belanja honor Output Kegiatan.
- Belanja barang persediaan sebesar Rp. 181,269,980,- meliputi kegiatan pembayaran; Belanja barang persediaan barang konsumsi.
- Belanja barang jasa sebesar Rp. 533,029,852,- meliputi kegiatan pembayaran belanja jasa lainnya,

jasa profesi, belanja langganan daya dan jasa lainnya, belanja langganan listrik, telepon, dan air dan belanja sewa.

- Belanja barang pemeliharaan sebesar Rp. 2,563,502,157,- meliputi kegiatan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan dan jembatan, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin.
- Belanja barang perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 2,070,120,980,- meliputi kegiatan pembayaran belanja perjalanan biasa, belanja perjalanan tetap, perjalanan dinas dalam kota, Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
- Realisasi Penggunaan BBM sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp. 3,904,225,000, sesuai dengan nilai kontrak,

Dengan rincian Pembayaran sebagai berikut:

TERMIN	DESKRIPSI TERMIN	TGL TERMIN	AWAL	TERTAGIHKAN	SISA ENCUMBRANCE
1	TERMIN 1	2024-02-27	243,518,000	243,518,000	0
2	TERMIN 2	2024-02-08	427,548,000	427,548,000	0
3	Termin 3	2024-05-29	237,593,000	237,593,000	0
4	Termin 4	2024-06-17	556,003,000	556,003,000	0
5	Termin 5	2024-06-24	250,924,000	250,924,000	0
6	TERMIN 6	2024-07-18	136,868,000	136,868,000	0
7	Termin 7	2024-09-06	787,670,000	787,670,000	0
8	Termin 8	2024-11-19	103,391,000	103,391,000	0
9	Termin 9	2024-12-02	496,872,000	496,872,000	0
10	Termin 10	2024-12-06	580,651,000	580,651,000	0
11	Termin 11	2024-12-17	83,187,000	83,187,000	0

Terdapat Pengembalian belanja Non Operasional sebesar Rp. 13,725,000, berupa kelebihan bayar biaya delegasi kapal Pengawas yang sudah di setorkan kembali sesuai dengan No billing 702408291391071; NTB 042831472627; NTPN 4BBE85229TI955IV tanggal 30 Agustus 2024.

Belanja Modal
Rp 882,601,310

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 882,601,310 dan Rp. 2,082,413,097 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2022*

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	239.883.510	320.304.940	1335,25
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	642.717.800	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin		1.762.108.157	
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	882.601.310	2.082.413.097	0,00
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	882.601.310	2.082.413.097	-57,62

Perbandingan nilai Belanja Modal tahun 2024 dan 2023 pada tabel diatas mengalami penurunan yang signifikan, di tahun 2024 belanja modal hanya kegiatan rutin tahunan seperti docking baik kapal pengawas ataupun speedboat pengawasan dan pembangunan pagar kantor.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0, dan Rp.0. Tidak adanya belanja modal tanah karena sudah dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	0	0	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal	-		-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 sebesar Rp 239,883,510 untuk pembelanjaan Pengadaan Perangkat Pengolah data, Lap Top, dan mebalair kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	239.883.510	320.304.940	133,53
Jumlah Belanja Kotor	239.883.510	320.304.940	133,53
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	239.883.510	320.304.940	133,53

Penurunan nilai belanja modal peralatan dan mesin di TA 2024 tidak terlalu besar dibandingkan Semester I 2023 karena Nilai dan Jumlah kegiatan yang berbeda. TA 2024 berupa perangkat pengolah data, Lap top, dan belanja modal Pengadaan mebelair Kantor Stasiun PSDKP Tahuna dan Perlengkapan Kapal Pengawas. Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas Hiu 15 No 00616T/170445/2024 Tanggal 8/11/2024 Rp. 59,761,000 Pengadaan Perangkat Pengolah Data No. 00188T/170445/2024 tanggal 5/4/2024 Rp. 67,500,000, Pengadaan Paket Roller Blind No. 00617T/170445/2024 tanggal 8/11/2024 Rp. 62,738,000.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan *Periode* 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 642,717,800,- dan Rp.0,., Perbandingan Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan *Periode* 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan	0	0	
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	642.717.800	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	642.717.800	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	642.717.800	0	0,00

Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan bangunan berupa Pembangunan Pagar dan Pos jaga kantor stasiun PSDKP Tahuna. perencanaan Teknis Pembangunan Pagar dan Pos Jaga No. 00178T/170445/2024 tanggal 4/4/2024 Rp. 157,496,216; Pembangunan Konstruksi Pagar dan Pos Jaga (Uang Muka 30%), Temin I; Termin II; Termin III. Sesuai BAST :22/BA.ST/PPK-Sta.6/XI/2024 Tgl 15 Nov 2024 dan Pengawasan Konstruksi Pembangunan Pagar BAST 19/BA.ST/PPK-Sta.6/X/2024 tgl 18 Oktober 2024 Rp. 56,600,000.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan *Periode* 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0. Tidak ada

belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan di tahun anggaran 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode 31

Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	30 September 2024	30 September 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	-
Belanja Modal Irigasi	0	0	-
Belanja Modal Jaringan			-
Belanja Penambah Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	-
Belanja Penambah Nilai Irigasi	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya *Periode* 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Belanja

Bantuan Sosial

Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial *Periode* 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp.0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per *Periode* 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0 yang merupakan

kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP dan TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut.

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Periode 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2022*

Keterangan	31 Des 2024	31 Des 2023
Uang Tunai	-	-
Kwitansi yang belum di SPMkan	-	-
Bank BRI No.acc 016801000257300	-	-
GU KKP	-	-
Jumlah	-	-

Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan Penihilan dan pengembalian sisa Uang Persediaan senilai Rp. 40,780,- sesuai NTPN 7DB785UFFRS6DP2P tanggal 30 Desember 2024.

Kas di Bendahara **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**
Penerimaan
Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya dan **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**
Setara Kas Rp.0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-

masing sebesar Rp. 0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Kas ini merupakan LS Perjalanan Dinas yang belum ditarik dan dibayarkan

Piutang PNB

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Bagian Lancar

Tagihan TP/TGR

Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar**TPA****Rp0****C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan**Piutang Tak****Tertagih – Piutang****Lancar****Rp0****C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

**Belanja Dibayar
di Muka Rp0****C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang**Masih Harus****Diterima Rp0****C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-

masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan Rp
730,517,104*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 730,517,104 dan Rp.550,725,642 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	15.508.000	4.648.000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Suku Cadang	715.009.104	543.344.320
Jumlah	730.517.104	547.992.320

Berikut ini Rincian Persediaan untuk T.A 2024 adalah sebagai berikut; Beban Persediaan Konsumsi terdiri dari Alat Tulis Rp. 1,184,000 , Penjepit Kertas Rp 1,433,500. Penghapus Rp. 240,000, Buku Tulis Rp. 172,500. Ordner Map Rp. 233,000 Penggaris Rp.

50,000. Cutter Rp. 40,000. Alat Perekat Rp. 637,500 Staples Rp.60,000. Isi Staples Rp.150,000. Kertas HVS Rp. 3,625,000. Kertas Cover Rp.60,000. Tinta Cetak Rp. 6,120,000. USB Rp. 99,000. Batu Batrei Rp. 633,500. Alat/bahan kantor lainnya Rp.740,000. berdasarkan Berita Acara Opaname Fisik Persediaan Nomor. BA.1492/PSDKPSTA.6/PL.510/IX/2024 Tanggal 31 Desember 2024.

Adapun tabel mutasi persediaan sebagai berikut:

KODE	URAIAN	NILAI SID 01-JAN-2024	MUTASI		NILAI SID 31-DEC-2024
			TAMBAH	KURANG	
117111	Barang Konsumsi	3.778.050	152.355.980	170.324.030	15.508.000
117114	Suku Cadang	548.048.892	444.322.381	278.180.289	715.009.104
117121	Bahan Baku	0	0	0	0
117186	Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Jumlah		550.725.642	626.278.361	448.486.899	730.517.104

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	550.725.642
Mutasi tambah:	
Pembelian	626.278.361
Reklas Keluar	0
Reklas Masuk	0
Hasil Opname Fisik	-
Saldo per 31 Desember 2024	1.177.004.003
Mutasi kurang	-446.486.899
Nilai Buku per 31 Desember 2024	730.517.104

*Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang

ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

Rp2.228.156.034

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.2.228.156.034 dan Rp.2.228.156.034. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 2.141 meter persegi senilai Rp 574.030.000.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2.228.156.034
Mutasi tambah:	0
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	0
Pengembangan melalui KDP	0
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 September 2023	2.228.156.034

Rincian Tanah TA 2024

No	Luas	Lokasi	Nilai 30 September 2023	Nilai Koreksi	Nilai 30 September 2024
1	561 m2	Kab. Kepulauan Sangihe	257.034.000	-	257.034.000
2	731 m2	Kab. Kepulauan Talaud	95.176.000	-	95.176.000
3	849 m2	Kab. Kepulauan Talaud	221.820.000	-	221.820.000
4	1500m2	Kab. Kepulauan Sangihe	1.654.126.034	-	1.654.126.034
Jumlah			2.228.156.034	-	2.228.156.034

Peralatan dan

Mesin

Rp. 39,866,263,237

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp. 39,866,263,237 dan Rp.40.055.217.176. Nilai

Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	40.055.217.176
Mutasi tambah:	
Pembelian	239.883.510
Penghentian aset dari penggunaan	500.708.316
Reklas Keluar	0
Reklas Masuk	0
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2024	39.794.392.370
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2024	-37.147.326.203
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2.647.066.167

Saldo perolehan nilai per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 40.055.217.176 nilai ini mengalami perubahan pada tahun 2024 dengan adanya pembelian senilai Rp. 117.384.510 antara lain, Lemari Besi Rp.8.997.660, Filling Cabinet Rp.7.188.360, Kursi besi Rp.9.199.680, Sice Rp.24.498.810, Lap Top Rp.67.500.000. Roller Blind Rp. 62,738,000.

Gedung dan

Bangunan

Rp 10,071,443,993

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp. 10,071,443,993 dan Rp.9.428.726.193 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	9.428.726.193
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	642.717.800
Pengembangan Langsung	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Koreksi semua hasil penilaian kembali	-
koreksi nilai tim penertiban aset	-
Saldo per 31 Desember 2024	10.071.443.993
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1.118.875.850)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	8.952.568.143

Dilakukan penyelasan KDP menjadi aset meliputi perencanaan Teknis Pembangunan Pagar dan Pos Jaga No. 00178T/170445/2024 tanggal 4/4/2024 Rp. 157,496,216; Pembangunan Konstruksi Pagar dan Pos Jaga (Uang Muka 30%), Temin I; Termin II; Termin III. Sesuai BAST :22/BA.ST/PPK-Sta.6/XI/2024 Tgl 15 Nov 2024 dan Pengawasan Konstruksi Pembangunan Pagar BAST 19/BA.ST/PPK-Sta.6/X/2024 tgl 18 Oktober 2024 Rp. 56,600,000.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp995.251.376*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.995.251.376 dan Rp.995.251.376. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	995.251.376
Mutasi tambah:	
Pengembangan melalui KDP	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Penyelesaian Pembangunan Langsung	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 30 September 2024	995.251.376
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	(194.574.692)
Nilai Buku per 30 September 2024	800.676.684

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Dengan rincian ;

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	0
31 Desember	0

Sampai dengan Desember 2024 sudah tidak terdapat KDP, karena pekerjaan sudah selesai dan sudah membentuk aset.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp.
(38,514,679,056)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp. (38,514,679,056) dan Rp (34,218,796,651) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	39.866.236.237	37.147.326.203	2.718.910.034
2	Gedung dan Bangunan	10.071.442.993	1.118.875.850	8.952.567.143
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	995.251.376	194.574.762	800.676.614
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		50.932.930.606	38.460.776.815	12.472.153.791

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp.385,000*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.385,000 dan Rp71,649,067. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas atau tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. Progres untuk sudah sampai pada status henti guna namun belum diusulkan untuk lelang.

Saldo Awal	71.649.067
Mutasi tambah:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	427.339.249
Pengembangan Nilai Aset	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(498.603.316)
Saldo per 31 Desember 2024	385.000
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2024	0
31 Desember	385.000

Terdapat penghentian aset dikarenakan rusak berat hasil BA Invent No B.1448/PSDKPSta.6/PL.110/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 dari penggunaan senilai Rp. 427.339.249, yang kemudian akan di usulkan penghapusan aset senilai Rp. 498.603.316, sehingga pada 31 Desember 2024 masih terdapat aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan Rp. 385.000 berupa 1 Unit

UPS dengan kondisi rusak berat.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp(71,649,067). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 3,535,082*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 3,535,082 dan Rp.1,775,557. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang tersebut berupa tagihan Telp bulan Desember 2024 senilai Rp.3.082 dan Tagihan Air Desember 2024 Rp. 3,532,000 dan sudah dilakukan

pembayaran.

Uraian	Lokasi	PSDKP Tahuna	Total
Air		3.532.000	3.532.000
Listrik		3082	3.082
		Jumlah	3.535.082

Pendapatan

Diterima di Muka Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya,.

Ekuitas

Rp 15,373,417,606

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 15,373,417,606 dan Rp.19,039,118,302 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
PNBP*

Rp 12,009,352

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 12,009,352 dan Rp114.714.794. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	12.009.352	114.714.794	
Jumlah	12.009.352	114.714.794	0,00

Pendapatan Negara Bukan Pajak berasal dari dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Pagar dan Pos Jaga kantor stasiun PSDKP Tahuna yang telah diabayarkan dengan pemotongan melalui SPM No. 00640T/170445/2024 SP2D No. 240831302002698 tanggal 5 Desember 2024

*Beban Pegawai
Rp. 4,034,240,411*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4,034,240,411 dan Rp. 3,570,679,049. Beban Pegawai adalah beban atas

kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Untuk jumlah pegawai di Stasiun PSDKP Tahuna sebanyak 30 Pegawai.

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1.815.622.605	1.763.341.982	97,12
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	193.228.678	34.012.295	17,60
Beban Lembur	48.910.000	73.609.000	
Beban Lembur PPPK	5.835.000	1.649.000	
Beban Tunjangan Khusus Kinerja	1.787.260.457	1.664.621.579	93,14
Beban Tunjangan Khusus Kinerja PPPK	183.383.671	35.067.393	19,12
Sub Total	-	-	
Pengembalian Belanja	811.100	423	0,05
Jumlah	4.034.240.411	3.572.301.672	88,55

*Beban
Persediaan Rp
170,326,630*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 170,326,630 dan Rp. 215,516,000 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	170.326.630	141.221.000	83
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	#DIV/0!
beban penyesuaian nilai persediaan	-	-	0
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0
Jumlah	170.326.630	141.221.000	83

*Beban Barang
dan Jasa Rp
7,114,637,316*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 7,114,637,316 dan Rp. 11,219,248,920. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Kantor	825.375.204	601.054.836	37,32
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	134.090.600	91.043.100	47,28
Beban Pengiriman Surat dinas PosPusat	1.671.400	1.271.250	31,48
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	87.504.000	93.822.000	4,15
Beban Bahan	4.815.741.220	4.506.539.427	3,34
Beban Honor Output Kegiatan	140.100.000	25.650.000	446,20
Beban Barang Non Operasional Lainnya	327.455.515	262.203.500	24,89
Beban barang Operasional Lainnya	220.910.000	0	
Beban Langganan Listrik	149.159.500	89.720.000	66,25
Beban Langganan Telepon	151.653.542	93.390.936	578,44
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.000.000	1.580.000	0,00
Beban Jasa Profesi	900.000	1.200.000	
Beban Langganan Air	58.700.900	21.501.400	173,01
Beban jasa Lainnya	170.375.435	115.016.760	48,13
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Bebean Jasa Penanganan pandemi Covid19	0	0	
Jumlah	7.087.637.316	5.903.993.209	20,05

Beban**Pemeliharaan Rp****2,394,654,045****D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,394,654,045 dan Rp. 1,341,238,310. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan dikarenakan semakin banyak belanja barang maupun Kontrak Pekerjaan baik itu Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Suku Cadang dan Jalan dan Jembatan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan Periode 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	157.641.200	245.192.290	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.001.206.026	428.583.233	366,94
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00
Beban Persediaan Suku Cadang	235.806.819	259.160.771	982,01
Jumlah	2.394.654.045	932.936.294	117,75

Beban**Perjalanan Dinas****Rp.****2,081,347,497****D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,081,347,497 dan Rp. 1,692,716,607. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Periode 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.573.863.227	700.754.330	162.76
Beban Perjalanan Tetap	0	0	75.09
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	171.210.000	96.600.000	201.15
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	55.635.800	8.332.500	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	269.411.953	148.204.056	160.62
Jumlah	2.070.120.980	953.890.886	145.12

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 4,713,321,250

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4,713,321,250 dan Rp. 5,115,667,059. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.460.865.566	2.615.127.299	2.98
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	216.520.857	104.140.443	79.23
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	19.856.000	9.928.000	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	15.753.827	7.876.913	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	325.000	162.500	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.713.321.250	2.737.235.155	0,00

Beban Penyisihan

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban

*Piutang Tak
Tertagih Rp0*

untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp.
10,393,008*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan aset Non lancar	10.393.008	0	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset non Lancar	15.750.000		
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5.356.992	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	10.393.008	0	0,00

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional berupa Selisih beban Persediaan. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp. 15.750.00, berasal dari hasil penjualan lelang peralatan dan mesin speedboat Napoleon 017 tanggal 6 Juni 2024 NTPN; 5215E2G4VPKP9SIR, NTB; 626998307639. Beban Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari usulan penghapusan Alsin yang masih memiliki nilai buku berupa Thermogun Rp.5.536.992.

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
19,039,118,302*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar RP. 19,039,118,302 dan RP. 22,097,073,044.

*Defisit LO
Rp(20,486,124,789)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2022 adalah sebesar Rp(20,486,124,789) dan Rp(23,040,359,262). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode

sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0 **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp(4,617,112) **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. Rp(4,617,112) dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain Rp(8,111) **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp Rp(8,111) dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 16,825,033,094 dan Rp. 19,982,404,520. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2024	2023
Diterima dari Entitas Lain	29.381.552	114.714.794
Ditagihkan ke Entitas Lain	16.855.839.146	9.026.943.513
Transfer Keluar	-	-
Transfer Masuk	-	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah	16.826.457.594	8.912.228.719

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dd pnbp, dk blnja ira

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp.0 sedangkan DKEL sebesar Rp.0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung

sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SEBELUM TANGGAL NERACA

Sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2024 , tidak ada kejadian penting sebelum tanggal neraca. Terdapat Pekerjaan kontraktual yang sudah berjalan, telah dilengkapi juga dengan jaminan pelaksanaan kontrak sesuai dengan SPK yang terbit. Adapun pekerjaan meliputi PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN PAGAR DAN POS JAGA SPK 013/SPK/PPK-Sta.6/RP.062/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 sudah realisasi Rp. 73,920,000. Dan Pekerjaan PEMBANGUNAN KONSTRUKSI PAGAR DAN POS JAGA SPK 022/SPK/PPK-Sta.6/RP.062/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024. Pekerjaan tersebut telah selesai dan membentuk aset.

Sisa BBM/Des 2024

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Temuan dan Tindak lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sampai dengan selesainya penyusunan Laporan Keuangan Semester I per 30 Juni 2024 telah menindak lanjuti temuan BPK berupa pengembalian kelebihan bayar atas tunjangan kinerja pegawai tugas belajar NTPN; 29B0548VVEPI5KNN, NTB; 000000573432 tanggal 7 Juni 2024 Rp.1.622.200

Rekening Pemerintah dan NPWP Satuan Kerja.

Berdasarkan surat persetujuan pembukaan rekening milik Stasiun PSDKP Tahuna dari KPPN Tahuna Nomor S-1860/WPB.12/KP.20/2020 Tanggal 06 Juli 2020 bahwa pada dasarnya menyetujui pembukaan

rekening virtual pengeluaran pada BRI Cabang Tahuna dengan Nomor rekening Virtual 651151704451000 | BPG 083 STASIUN PSDKP TAHUNA. NPWP Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna 00.159.964.6-825.000.a.n Stasiun PSDKP Tahuna DITJEN Pengawasan Sumberdaya Kelautan tanggal 1 April 2021.

Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (terlampir) dengan rincian sebagai berikut;

Kuasa Pengguna Anggaran : Bayu Y Suharto, S.St.Pi, M.Si

Pejabat Pembuat Komitmen: Daniel C. Tindatu, S.Pi, M.Si

Pejabat PPSM : Eman S Monintja, S.Pi

Bendahara Pengeluaran : Donnycius Pudihang, A.Md.Pi

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Revisi.

DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna (170445) Nomor: SP DIPA-032.05.2.170445/2023 tanggal 30 November 2022, dengan kode Digital Stamp (DS) 1687-4213-5778-3896 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.19.386.793.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pada tanggal 27 Desember 2022, dilakukan penerapan kebijakan automatic adjustment atau penyesuaian blokir otomatis. Kebijakan automatic adjustment diterapkan untuk menggantikan langkah refocusing

anggaran. Pembebanan pada Satker Stasiun PSDKP Tahuna, sebesar Rp.1.487.892.000,- (Satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari beberapa akun belanja disetiap kegiatan yang ada.

Sampai pada Triwulan II tahun 2023, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna (170445) telah melakukan revisi anggaran sebanyak 4 (empat) kali. Penjelasan terhadap revisi Stasiun PSDKP Tahuna, sebagai berikut:

Revisi DJA

Tema Revisi : Revisi Halaman IV A DIPA Stasiun PSDKP Tahuna

Mekanisme Revisi

Melakukan revisi automatic adjustment terhadap DIPA Stasiun PSDKP Tahuna.

Alasan / pertimbangan

Dilakukannya revisi automatic adjustment adalah untuk pemenuhan ketersediaan dana cadangan negara.

Tujuan revisi anggaran

Untuk mengantisipasi keadaan darurat dalam penanganan keuangan negara.

Revisi Kanwil

Tema Revisi : Revisi Halaman IIII DIPA

Mekanisme Revisi

Penyesuaian dan koreksi terhadap halaman IIII DIPA;

Pergeseran anggaran dalam RO yang sama.

Alasan / pertimbangan

Dilakukannya revisi kanwil adalah untuk koreksi halaman IIII DIPA dan penyesuaian terhadap belanja kegiatan.

Tujuan revisi anggaran

Perbaikan dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran khususnya pada Triwulan I.

Revisi Kanwil

Tema Revisi : Revisi Halaman IIII DIPA

Mekanisme Revisi

Penyesuaian dan koreksi terhadap halaman IIII DIPA;

Pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam RO yang sama.

Alasan / pertimbangan

Dilakukannya revisi kanwil adalah untuk koreksi halaman IIII DIPA dan penyesuaian terhadap belanja kegiatan.

Tujuan revisi anggaran

Perbaikan dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran khususnya pada Triwulan II.

Revisi Kanwil

Tema Revisi : Revisi Halaman IIII DIPA

Mekanisme Revisi

Penyesuaian dan koreksi terhadap halaman IIII DIPA;

Pergeseran anggaran dalam RO yang sama;

Pergeseran anggaran antar KRO non Prioritas Nasional.

Alasan / pertimbangan

Perubahan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan.

Tujuan revisi anggaran

Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja dari anggaran yang ada.

Proses Penetapan Status Penggunaan BMN

Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan
(Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan	
(Rp)		
1	Tanah	2.228.156.034
2	Peralatan dan Mesin	36.077.380.806 865.879.950
3	Gedung dan Bangunan	9.428.726.193
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	995.251.376
5	Aset Tetap Lainnya	
6	KDP	
TOTAL	39.306.028.180	1.514.855.770

Penetapan Status Penggunaan BMN Stasiun PSDKP Tahuna telah Keluar SK Penetapan Status Penggunaan yang dikeluarkan oleh KPKNL Manado dan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun asset tersebut adalah :

Tanah Bangunan Kantor 3 lokasi dengan izin prinsip NO. B.1123/SJ/PL.930/X/2018 dan SK.PSP Kementerian Keuangan No. 241/KM.06/WKN.16/KNL.01/2018 senilai Rp.574.030.000,00

Gedung dan Bangunan sejumlah 26 unit dengan SK. PSP Kementerian Keuangan No.101/KM.06/WKN.16/KNL.01/2018 tanggal senilai Rp. 11.475.734.000,00.

Kendaraan darat sejumlah 8 Unit dengan SK. PSP Kementerian Keuangan No.100/KM.06/WKN.16/KNL.01/2018 tanggal 12 September 2018 dengan nilai sebesar Rp.1.172.402.260,00.

Kendaraan Laut sejumlah 3 Unit dengan SK PSP Kementerian Keuangan No.110/KM.6/KN.5/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp.32.653.697.411,00

Peralatan dan Mesin diatas 100 Juta sejumlah 1 Unit dengan SK. PSP Kementerian Keuangan No.99/KM.06/WKN.16/KNL.01/2018 sebesar Rp.138.117.125,00.

Peralatan dan mesin sejumlah 255 unit dengan SK.PSP Kementerian Keuangan No.241/KM.06/WKN.16/KNL.01/2018 dengan nilai akumulasi Rp. 1.037.502.130,00.

Peralatan dan mesin sejumlah 37 unit dengan SK.PSP Kementerian Kelautan dan Perikanan no.887/KEPMENKP/SJ/PL.930/2019 dengan nilai akumulasi Rp. 221.835.500,00.

Jaringan sejumlah 2 unit dengan SK.PSP Kementerian Kelautan dan Perikanan no.733/KEPMENKP/SJ/PL.930/2019 dengan nilai akumulasi Rp. 9.000.000,00.

Bangunan Mess Operator sejumlah 2 unit dengan SK.PSP Kementerian Keuangan No.07/KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 dengan nilai akumulasi Rp. 1.876.837.884,00.

Irigasi (Talud Penahan Air) sejumlah 1 unit dengan SK.PSP Kementerian Keuangan No.24/KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 dengan nilai akumulasi Rp. 426.646.350,00.

Tanah Kantor sejumlah 1 unit dengan SK.PSP Kementerian Keuangan No.71/KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 dengan nilai akumulasi Rp. 574.030.000,00.

Peralatan dan mesin sejumlah 49 unit dengan SK.PSP Kementerian Keuangan No.36/KM.06/WKN.16/KNL.01/2020 dengan nilai akumulasi Rp. 332.474.640,00.

Peralatan dan mesin sejumlah 3 unit Kendaraan dengan SK.PSP Kementerian Keuangan No.270/KM.06/WKN.16/KNL.01/2020 dengan nilai akumulasi Rp. 485.400.000,00.

Peralatan dan mesin sejumlah 5 unit dengan SK.PSP Kementerian Kelautan dan Perikanan no.733/KEPMENKP/SJ/PL.930/2021 dengan nilai akumulasi Rp. 125.000.000,00.

Gedung dan Bangunan sejumlah 1 (satu) unit dengan SK PSP Kementerian Keuangan No.189/KM.6/KNL.1601/2024 senilai Rp1.386.010.546,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Peralatan dan mesin sejumlah 93 (Sembilan Puluh Tiga) unit dengan SK PSP Kementerian Kelautan dan Perikanan No.426/KEPMEN-

KP/SJ/PL.710/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan nilai akumulasi Rp 261.276.565,00 (dua ratus tujuh enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

Peralatan dan Mesin sejumlah 16 (enam belas) unit dengan SK PSP Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 884/KEPMEN-KPSJ/PL.710/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dengan nilai akumulasi Rp. 93.408.730 (sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)

Peralatan dan mesin sejumlah 8 (delapan) unit dengan SK PSP Kementerian Kelautan dan Perikanan No.188/KEPMEN-KP/SJ/PL.710/2024 tanggal 29 Juni 2024 dengan nilai akumulasi Rp. 228.346.210 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah)

Adapun tabel realisasi BBM sampai dengan bulan Juni 2024 sebagai berikut :

Nama Kapal	Bulan	Tanggal BBM Awal	Sisa Volume BBM Awal (Liter)	Jumlah Pengisian (Liter)	Pemakaian (Liter)	Jumlah Sisa BBM Akhir (Liter)
a	b	c	d	e	f	h = (d+e-f)
KP. Hiu 15	Januari	29 Desember 2023	11.000	-	7.630	3.370
	Februari	31 Januari 2024	3.370	10.000	2.210	11.160
	Maret	29 Februari 2024	11.160	18.000	17.240	11.920
	April	01 April 2024	11.920	-	4.740	7.180
	Mei	30 April 2024	7.180	34.000	32.380	8.800
	Juni	31 Mei 2024	8.800	17.000	17.200	8.600

Berdasarkan BA sisa BBM solar KP HIU 15 Nomor 092/PSDKPSta.6/PL.450/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 sisa 8.600 Liter solar, dengan realisasi sebesar Rp. 1,715,586,000 dari nilai kontrak Rp. 3,371,250,000.

